

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana adalah peristiwa yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun, dengan teknologi canggih sekalipun dan merupakan permasalahan yang dihadapi di setiap Negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terjadi bencana, Dikarenakan letak Indonesia yang berada di kawasan yang dengan Cincin Api Pasifik, yang membuat Indonesia memiliki gunung berapi yang aktif. Akibatnya Indonesia sering mengalami bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Gempa bumi telah terjadi di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Aceh, DIY, Yogyakarta, NTT (Alor), hingga Papua (Nabire)¹. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)² mencatat pada tahun 2018 terjadi sebanyak 2.436 kejadian bencana di Indonesia, salah satu bencana yang terjadi yaitu Gempa dan Tsunami yang terjadi pada 28 September 2018 di Sulawesi Tengah.

Gempa Palu terjadi pada hari Jumat, tanggal 28 September 2018, pukul 18:02:44 waktu setempat (WITA). Gempa berkekuatan 7,4SR, yang berpusat di 26km Utara Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa tersebut menyebabkan tsunami yang kemudian serta disusul dengan likuifaksi besar-besaran di daerah Petobo dan Balaroa, Kota Palu. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan pada 20 Oktober 2018, jumlah korban yang meninggal dunia akibat kejadian gempa bumi mencapai 2.113 jiwa Korban luka-luka berjumlah 4.162 jiwa, hilang 1.309 jiwa, dan

¹ Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Jurnal Riset Kebencanaan Indonesia Vol. 2 No. 2”, Oktober 2016 hal.95

² “Deretan bencana alam mematikan yang menerjang Indonesia sepanjang 2018” BBC News, 30 December 2018
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-46691586> (Diakses pada 7 November 2020)

bangunan yang mengalami kerusakan berjumlah 68.451 unit. Tercatat juga 223.751 jiwa pengungsi di Sulawesi Tengah dan 8.731 jiwa di luar Sulawesi Tengah³.

Selain itu, data yang dirilis oleh BNPB pada 23 Oktober 2018 mencatat kerusakan dan kerugian yang diakibatkan telah mencapai Rp 15,29 triliun. Kerusakan akibat gempa dan tsunami Palu mencapai Rp.13,27 triliun. Sementara kerugian akibat bencana tersebut mencapai Rp.2,02 triliun⁴.

Kerugian yang paling besar ada di sektor permukiman dan pedagang karena hampir semua bangunan di sepanjang Pantai Teluk Palu atau Pantai Talise rata dengan tanah diterjang tsunami. Sebelumnya sepanjang Pantai Talise merupakan lokasi wisata dan juga lokasi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berjualan⁵.

Disampaikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR kerusakan pada sektor permukiman dan sosial ini kemudian berakibat pada produktivitas masyarakat di lokasi terdampak. Penurunan ini menyebabkan perubahan pendapatan dan terhambatnya perekonomian sehingga masyarakat pesisir Pantai Talise terutama para pelaku UMKM yang sebelumnya memiliki lahan usaha harus mencoba menyesuaikan dengan keadaan pasca bencana dan mencari solusi untuk dapat menyambung hidup. Oleh karena itu, disampaikan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) bahwa pembangunan kembali menjadi sebuah prioritas oleh pemerintah⁶.

³ Nasional, T. P. S. G., Hanifa, N. R., Djarwadi, D., & Sarsito, D. A. Gempa Palu Provinsi Sulawesi Tengah 28 September 2018 (M7. 4).Hal.3

⁴ Hendra Fiana," Kerusakan dan Kerugian Gempa di Palu Meningkatkan Jadi Rp15,29 Triliun", Tirto.Id. 26 Oktober 2018 <https://tirto.id/kerusakan-dan-kerugian-gempa-di-palu-meningkat-jadi-rp1529-triliun-c8GW> (Diakses 07 November 2020)

⁵CNN Indonesia "BNPB: Kerugian Akibat Gempa Palu Capai Rp 18,4 Triliun"<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181028193229-20-342094/bnpb-kerugian-akibat-gempa-palu-capai-rp184-triliun>.

⁶ Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, "Menata Kembali Permukiman Penduduk di Sulawesi Tengah dengan Rencana Terpadu"

Oleh karena itu, untuk menangani kondisi pascabencana, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia⁷ menyatakan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mempertimbangkan lokasi strategis dari Kota Palu sebagai pusat aktivitas dari kabupaten di sekitarnya.

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rekonstruksi merupakan pembangunan kembali sarana dan prasarana kelembagaan wilayah pasca terjadi bencana. Pembangunan tersebut meliputi tingkat pemerintahan dan masyarakat yang tujuannya adalah pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, sosial budaya, tegaknya hukum, ketertiban dan juga pulihnya aktivitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan pasca bencana⁸. Sedangkan Rehabilitasi diartikan sebagai perbaikan dan pemulihan segala aspek pelayanan public dan masyarakat hingga mencapai tingkat yang memadai di wilayah pasca bencana. Tujuannya adalah untuk berjalannya kembali semua aspek kehidupan dan pemerintahan pada wilayah pasca bencana⁹. Relokasi dalam konteks pemulihan pasca bencana merupakan bagian dari program pembangunan dalam rangkaian upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana .

Salah satu upaya dari pemerintah untuk memperbaiki produktivitas masyarakat dalam bidang perekonomian adalah dengan menyediakan lahan relokasi untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak tsunami di kawasan pantai Teluk Palu ke kawasan wisata Hutan Kota Kaombona Palu. Pemerintah Kota

<https://bpiw.pu.go.id/uploads/publication/attachment/Buletin%20BPIW%20SINERGI%20Edisi%2034-%20Oktober%202018.pdf> (Diakses pada 22 juni 2020)

⁷ Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, “Proyek Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah” April 2019 hal.1

⁸ Badan Nasional Penanggulangan Bencana <https://bpbd.ntbprov.go.id/?q=content/penanganan-bencana> (diakses pada 22 juni 2020)

⁹ Ibid.

tidak memungut biaya sewa untuk para pelaku UMKM Mikro Kecil dan Menengah yang berjualan di Hutan Kota Kaombona. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kembali kesejahteraan masyarakat yang sebelumnya berubah akibat bencana yang melanda.

Melihat bagaimana bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu berakibat pada kehidupan masyarakat di kota Palu, mendorong peneliti untuk melihat bagaimana efektivitas program relokasi lahan usaha ke Hutan Kota Kaombona bagi pemulihan kesejahteraan pelaku UMKM pasca bencana Palu 2018.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana efektivitas program relokasi lahan usaha ke Hutan Kota Kaombona bagi pelaku UMKM pasca bencana gempa dan tsunami Palu 2018?

1.3 Kerangka Konsep

1.3.1 Efektivitas Program

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti “ada efeknya”, dapat berguna, ada pengaruh atau akibat. Efektivitas juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian sebuah tujuan. Menurut Subagyo dalam Budiani (2007) efektivitas merupakan kesesuaian antara output dan tujuan yang ditentukan. Hal tersebut serupa dengan pernyataan Emerson dalam Wilianto (2014:58)¹⁰ efektivitas merupakan pengukuran pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

¹⁰ J., Jans. "Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (Pdpm), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mambo Kecamatan Palu Utara Kota Palu." dalam *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 6, no. 2, (2014)

sebelumnya. Jadi efektivitas adalah sebuah kegiatan yang diukur berdasarkan kesesuaian antara tujuan awal dan hasil akhir yang dicapai. Kurniawan dalam Ari (2013:34¹¹) menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan menjalankan tugas atau fungsi (kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau kelembagaan. Pengertian tersebut bisa diartikan bahwa efektivitas adalah keberhasilan mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas selalu erat kaitannya dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang dicapai. Menurut Effendy (dalam Ari 2013), menjelaskan efektivitas merupakan bentuk komunikasi yang proses pencapaiannya sesuai dengan tujuan yang baik dalam bentuk biaya yang dianggarkan, waktu yang ditentukan, dan jumlah pelaksana dan peserta yang direncanakan.

Dengan begitu, untuk mengukur efektivitas bisa dilakukan dengan menilai antara rencana awal yang dilakukan dengan hasil akhir yang dicapai. Dimana jika hasil akhir dari usaha atau pekerjaan tidak sesuai dengan target yang diinginkan maka dapat dinilai tidak efektif, begitu pun sebaliknya jika hasil akhir dari usaha tersebut sudah sesuai dengan harapan yang ingin dicapai maka dapat dinilai efektif.

Menurut Campbell ¹²(dalam Susantri dkk, 2018) secara umum untuk mengukur efektivitas dapat digunakan 5 indikator sebagai berikut: (a) Keberhasilan program, (b) Keberhasilan sasaran, c) Kepuasan terhadap program, (d) Kesesuaian input dan output, (e) Pencapaian keseluruhan tujuan.

¹¹ Diantoro, Ari (2013) *Efektivitas Iklan Online Di Instagram Pada Brand Torch Dengan Pendekatan Epic Model (Studi Pada Followers Instagram Torch)*. S1 Thesis, Universitas Mercu Buana Jakarta.

¹² *Ibid* Hal.4

Menurut Campbell keefektifan suatu program yang diciptakan oleh pemerintah terlepas dari tujuan program itu sendiri. Jika tujuan yang ditetapkan sudah efektif maka efektivitas akan dengan mudah diukur.

Epstein dikutip Dharma (2004) dalam Susantri dkk (2018¹³) menjelaskan bahwa terdapat 4 kriteria untuk mengukur efektivitas suatu program pemerintah daerah yaitu: (1) kebutuhan masyarakat dapat dikontrol, (2) terdapat program layanan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, (3) mengukur kepuasan dan persepsi masyarakat untuk mengetahui kualitas layanan, (4) menyesuaikan diri dengan permasalahan yang ada di lapangan.

Penilaian mengenai kesesuaian program dengan hasil akhir merupakan cara untuk mengukur efektivitas program, dimana akan dilakukan perbandingan antara tujuan program dan hasil atau output dari program setelah dijalankan (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Amelia 2015)¹⁴. Selain itu pendapat dari peserta program dapat dipakai untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut disampaikan oleh Kerkpatrick yang dikutip dalam Amelia (2015) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program dapat dilakukan dengan melihat reaksi atau respon peserta yang mengikuti program.

¹³ SUSANTRI, Arni Eka. Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang. **JESS (Journal of Education on Social Science)**, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 1-11, apr. 2018. ISSN 2550-0147. Available at: <<http://jess.ppi.unp.ac.id/index.php/JESS/article/view/52>>. Date accessed: 02 dec. 2020. doi: <https://doi.org/10.24036/jess/vol2-iss1/52>.

¹⁴ RIZCAH AMELIA, 2015 "EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR" <https://core.ac.uk/download/pdf/77622151.pdf> (Diakses pada 25 juni 2020)

Sedangkan Budiani (2007:53) menyatakan indikator untuk mengukur efektivitas suatu program adalah sebagai berikut:

1. **Ketepatan sasaran** program yakni sejauh mana ketepatan program dalam menjangkau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.
2. **Sosialisasi program** yakni penyelenggara program mengadakan sosialisasi yang didalamnya menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program dan tujuan program kepada peserta program.
3. **Tujuan program** yaitu kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan atau harapan yang ditetapkan sebelumnya.
4. **Pemantauan program** yakni kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana program setelah dijalankan program tersebut, hal ini dianggap sebagai bentuk perhatian terhadap peserta program

1.3.2 Relokasi Lahan Usaha

Dalam KBBI Reloksi diartikan sebagai pembangunan kembali perumahan, harta kekayaan,, tanah produktif dan prasarana umum di tempat atau lahan yang lain. dalam program relokasi harus terdapat objek dan subjek yang terdampak dari perencanaan dan pembangunan relokasi tersebut (Sari, 2006). Dalam proses relokasi terdapat factor penting yang perlu diperhatikan yaitu lokasi dan tempat relokasi baru. Hal tersebut sangat berpengaruh karena hal tersebut yang menentukan kemudahan menuju lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Masing masing lokasi memiliki peluang dan keterbatasan. Dalam konteks pascabencana, relokasi merupakan salah satu program pembangunan yang terdapat dalam rangkaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program relokasi lahan usaha ke Hutan Kota Kaombona bagi pemulihan kesejahteraan hidup pelaku UMKM pasca bencana gempa dan tsunami Palu 2018

1.5 Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini peneliti mencari informasi dari penelitian penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan maupun kekurangan yang sudah ada.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Gede Surya Pratama Putra! Made Dwi Setyadhi Mustika pada tahun 2014 yang berjudul “Efektivitas Program Jamkrida dan Dampaknya terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja UMKM”.

Program Jamkrida merupakan program yang menyediakan jaminan kredit untuk pelaku UMKM dengan tujuan untuk membantu memberi modal usaha untuk kelangsungan dan pengembangan usaha mereka. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas dari program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di Kabupaten Tabanan, hal tersebut dilakukan untuk melihat dan mengetahui dampak dari program Jamkrida pada pendapatan dan pada penyerapan tenaga kerja UMKM yang berada di Kabupaten Tabanan. Sampel dalam penelitian ditentukan menggunakan rumus Slovin yang menghasilkan sebanyak 76 UMKM sebagai responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis efektivitas dan uji beda yang terdiri dari uji normalitas dan uji Wilcoxon. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Jamkrida di Kabupaten Tabanan dinilai sudah sangat efektif, dimana program tersebut telah membawa dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja UMKM di Kabupaten Tabanan.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Maria Vianney Chinggih Widanarto dan Ketut Sudibia pada tahun 2016 dengan judul “Efektivitas Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung”

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas program SPP beserta dampak program tersebut pada pendapatan dan kesempatan kerja kaum perempuan yang berada di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Dalam penelitian ini Efektivitas program akan dilihat berdasarkan variabel input, variabel proses dan variabel output. Variabel input dalam penelitian ini mencakup: sosialisasi program, ketepatan waktu pemberian bantuan, kecukupan jumlah bantuan, dan ketepatan sasaran program. Variabel proses mencakup ketepatan penggunaan dana bantuan, ketepatan waktu pengembalian bantuan, pendampingan dan evaluasi/monitoring, dan dalam variabel output mencakup pendapatan peserta sebelum mengikuti program dan sesudah mengikuti program, kesempatan kerja peserta sebelum dan sesudah mengikuti program. Dalam mengukur efektivitas program penelitian ini melakukan uji beda rata-rata pengamatan berpasangan yang bertujuan untuk melihat peranan program dalam peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program SPP di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dinilai sangat efektif juga membawa dampak positif dalam peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja untuk kaum perempuan. Dalam penelitian ini peneliti menyarankan agar jumlah bantuan lebih ditingkatkan lagi juga berharap bantuan tersebut dapat lebih tepat sasaran agar program tersebut dapat berjalan dengan baik secara terus menerus.

Penelitian ketiga yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Arni Eka Susantri Dasman Lanin dan Nora Eka Putri pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Pelayanan Publik Plus di Kecamatan Kuranji Kota Padang”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas implementasi program “public service plus” di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Kajian ini mendeskripsikan efektivitas pelaksanaan program dilihat dari kualitas aparatur, kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, disiplin, dan pengawasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini berjumlah 1285 pengguna layanan publik plus, dengan sampel 93 responden ditentukan dengan rumus Slovin dan menggunakan teknik random sampling. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pengukuran skala likert. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelenggaraan program pelayanan publik plus baru mencapai 49,7% dan tergolong cukup efektif. Dari sisi efektivitas penyelenggaraan program pelayanan publik ditambah dilihat dari kualitas aparatur, kompetensi penyelenggara, sarana dan prasarana, disiplin dan supervisi, program pelayanan hanya mencapai 57,3% dan tergolong cukup efektif.

Penelitian keempat yang menjadi acuan adalah penelitian yang dilakukan oleh, Agrio Scivo Kowaas, Novie Pioh, Neni Kumayas dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Tomohon International Flower Festival di Kota Tomohon”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diselenggarakannya Tomohon International Flower Festival (TIFF) dimana Festival tersebut dilakukan dengan maksud untuk menaikan potensi kota Tomohon yang diketahui sebagai kota bunga bersama industri

pendukungnya supaya mampu menjadi pusat industri bunga yang terletak di Indonesia Timur, selain itu event ini diharapkan mampu meningkatkan citra kota Tomohon untuk menjadi salah satu destinasi wisata di Sulawesi. Hal inilah yang kemudian memotivasi peneliti untuk melihat efektivitas dari pelaksanaan Tomohon International Flower Festival (TIFF), efektivitas penyelenggaraan dilihat menggunakan 4 indikator efektivitas yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa program Tomohon International Flower Festival sudah tepat sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam Tomohon International Flower Festival dan tingginya antusias warga Sulawesi Utara dalam pelaksanaan festival tersebut. Dalam penelitian ini indikator sosialisasi program dalam Tomohon International Flower Festival yang dilakukan Pemerintah Kota Tomohon dan panitia dinilai sudah baik dalam mendukung berjalannya festival tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya acara penyelenggaraan launching Tomohon International Flower Festival yang diselenggarakan di Jakarta dan roadshow di Bali sebagai salah satu cara untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan Tomohon International Flower Festival dinilai sudah mencapai tujuan awal program tersebut, dimana tujuan utamanya adalah untuk menjadikan Sulawesi Utara khususnya Tomohon salah satu destinasi wisata dunia dan membantu Tomohon untuk menjadis sentra industri florikultura Indonesia Timur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menemukan bahwa proses pemantauan program tidak dilakukan oleh pemerintah, dimana pemerintah hanya akan menerima kritik dan saran dari masyarakat namun tidak dilakukan kegiatan evaluasi secara resmi setelah pelaksanaan festival.

Penelitian kelima yang menjadi acuan adalah penelitian Ni Wayan Budiani yang dilakukan pada tahun 2006, dengan judul “c” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilakukannya Program Pencegahan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” yang merupakan program yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Eka Taruna Bhakti di Sumsel yang bertujuan untuk mencegah masalah pengangguran di Sumsel serta mengembangkan kesejahteraan masyarakat di Sumsel. Program ini diadakan sejak tahun 2005. Acara yang termasuk dalam program ini adalah jenis pelatihan untuk tenaga kerja perusahaan dengan departemen pemerintah atau swasta yayasan. Selain itu, juga dilakukan pembagian tenaga kerja kepada masyarakat di Sumsel. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis efektivitas program penanggulangan pengangguran yang diadakan oleh Karang Taruna Eka Taruna Bhakti di Sumsel, Denpasar Timur, Tingkat efektivitas program pencegahan pengangguran diukur menggunakan 4 indikator yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pengetahuan responden tentang tujuan program, dan pemantauan program oleh petugas Karang Taruna. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: Ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan program Pencegahan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” sudah cukup efektif, pelaksanaan sosialisasi program dinilai sudah sangat efektif namun ti pelaksanaan pemantauan program dinilai tidak efektif dikarenakan pemantauan yang seharusnya dilakukan setiap 3 bulan sekali, tidak dilakukan. Namun berdasarkan penelitian, terdapat peningkatan pendapatan yang dikarenakan adanya peningkatan keterampilan dari peserta setelah mengikuti pelatihan yang dilakukan dalam program Pencegahan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti”

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti ingin melihat tingkat efektivitas dari program Relokasi UMKM di Hutan Kota Kaombona bagi pemulihan kesejahteraan UMKM yang sebelumnya ada di Talise, dan penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif.

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Sugiyono (2013) merumuskan bahwa metode penelitian pada dasarnya dibagi ke dalam empat kata kunci, yaitu cara ilmiah, pengumpulan data, tujuan dan kegunaan, hal tersebut dimaksud dengan cara ilmiah adalah suatu kegiatan penelitian yang terjangkau oleh penalaran manusia, dapat diamati.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti perlu menentukan metode penelitian yang sesuai dengan sasaran atau tujuan penelitian. Metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

2.1.1 Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian evaluatif. Desain penelitian ini dipilih dengan pertimbangan untuk mengevaluasi efektivitas program relokasi lahan usaha ke Hutan Kota Kaombona bagi kesejahteraan. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan pendekatan deduktif. Pendekatan tersebut berangkat dari kerangka teori, gagasan para ahli, atau pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian hal tersebut dikembangkan menjadi sebuah permasalahan berserta dengan solusi yang